

## **DAMPAK KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP TRANSFORMASI STRUKTUR TENAGA KERJA DI PROVINSI JAWA BARAT**

***(The Impact on Fiscal Decentralization Policies on the Labor Structure Transformation in West Java Province)***

**M. Arief Dirgantoro<sup>1)</sup>, Sjafri Mangkuprawira<sup>2)</sup>, Hermanto Siregar<sup>2)</sup>, dan Bonar M. Sinaga<sup>2)</sup>**

### **ABSTRACT**

*The objectives of this research are: (1) To analyze labor structural transformation in West Java Province, (2) To analyze linkage intersector on labor structure transformation process interfarm, industry and other sectors, (3) To analyze impact of fiscal decentralization on economic growth and labor structure transformation in West Java Province. In order to answer the above, a simultaneous equation model was established, consisting of 32 structural equations and 15 identity equations. Furthermore, this research used data pooling where data were analyzed with descriptive analysis, econometrics model, as well as predictions using a variety of policy scenario alternatives. Model was then estimated by 2SLS method with SYSLIN procedures, while prediction simulation was performed by using SIMNLIN procedures. In its development era, West Java province have done transformation structure of labor. During this labor structure transformation process, the decrease on agricultural sector contribution was not automatically followed by increase in labor contribution in industrial sector since it was absorbed by other sectors such as the informal ones. The increase in local taxes receipt gave a positive impact on output growth, but it had a negative impact on agriculture labor, and it had lead to labor structure transformation. The result also showed that an increase in personel current expenditure and regional income from DAU gave a positive impact on agriculture output growth and it had not lead to labor structure transformation. Next, the increase development expenditure for agriculture gave a positive impact on output growth agriculture, but it had a negative impact on total output growth and it had not lead to labor structure transformation. Expenditure for infrastructure had a positive impact on output growth, and it had lead to labor structure transformation.*

*Key words: fiscal decentralization policy, economic growth, labor structure transformation, simultaneous equation model*

### **PENDAHULUAN**

Pembangunan yang dilakukan oleh setiap pemerintahan terutama ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan distribusi pendapatan, membuka kesempatan kerja, dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Guna mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama pada tahap awal pembangunan,

---

<sup>1)</sup> Staf pengajar pada Program Studi Ekonomi, Fakultas Pertanian, Univ. Haluoleo, Kendari

<sup>2)</sup> Staf pengajar dan Guru Besar pada Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB

diperlukan intervensi pemerintah. Berbagai usaha dan program dibuat untuk mendorong percepatan pertumbuhan sektor industri. Kebijakan pengembangan sektor industri tersebut berdampak langsung dan tidak langsung pada sektor pertanian, dan seharusnya dapat menyerap angkatan kerja yang terus meningkat. Namun, karena peningkatan angkatan kerja lebih besar daripada peningkatan kesempatan kerja, tingkat pengangguran terus mengalami peningkatan.

Strategi pembangunan yang dilakukan oleh sebagian negara-negara di dunia sampai pada dekade 1960-an masih menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi. Walaupun telah mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi, ternyata taraf hidup sebagian besar masyarakatnya tidak berubah. Masyarakat menginginkan bukan hanya peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan hasil pembangunan dan pemanfaatan sumber daya secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah merespon keinginan masyarakat tersebut dengan melaksanakan otonomi daerah. Untuk itu pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang mulai dilaksanakan pada tahun 2001. Kedua Undang-Undang tersebut telah direvisi masing-masing menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Keseimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, tetapi baru berlaku secara nasional mulai 1 Januari 2006. Pada tahun 2001, Provinsi Jawa Barat mulai menerapkan pola pembangunan dengan kebijakan desentralisasi fiskal. Dengan desentralisasi fiskal ini pemerintah daerah diberi kebebasan untuk menyusun sendiri program-program kerja dan merealokasikan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas daerah yang bertujuan meningkatkan kemampuan ekonomi daerah serta mengurangi kesenjangan antardaerah. Kebijakan desentralisasi fiskal akan berdampak pada transformasi ekonomi dan transformasi tenaga kerja serta transformasi kelembagaan.

Pada waktu pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan sentralistik, pemerintah pusat tidak mendelegasikan kekuasaannya kepada daerah-daerah. Hal ini menyebabkan terabaikannya aspirasi dan kemampuan kreativitas dari masyarakat lokal dan daerah. Selanjutnya, kondisi tersebut berimplikasi kepada kinerja pembangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dan kemampuan masyarakat lokal dan daerah. Masyarakat menjadi tidak mempunyai kekuatan untuk menolak kebijakan pemerintah pusat yang dicirikan oleh terkonsentrasinya kekuasaan yang bias ke perkotaan. Keadaan ini mendorong terjadinya *net transfer* sumber daya lokal dari wilayah pedesaan ke pusat-pusat perkotaan di lokasi kekuasaan, khususnya Jakarta, yang disebut *backwash process*.

Dampak dari adanya *backwash process* ini akan menyebabkan terjadinya aglomerasi industri serta menjadikan populasi penduduk di pusat-pusat perkotaan meningkat. Aglomerasi ekonomi yang besar-besaran tersebut akan menciptakan berbagai eksternalitas yang menimbulkan biaya-biaya sosial besar dan selanjutnya menurunkan efisiensi ekonomi kota dan tingkat kesejahteraan masyarakat keseluruhan. Dalam hal ini, teori penetesan pembangunan (*trickle down effect*) seperti yang diharapkan tidak pernah terjadi, bahkan sebaliknya justru yang terjadi adalah proses ke arah *backwash effect*.

Dengan kebijakan sentralistik, pemerintah daerah tidak diberi wewenang untuk perencanaan pembangunan. Pemberlakuan Undang-Undang No. 22 Tahun

1999 mengenai otonomi daerah berimplikasi luas dalam sistem perencanaan pembangunan di wilayah-wilayah di tingkat lokal tempat otonomi tersebut diletakkan pada tingkat kabupaten. Pada tahun 2001 Provinsi Jawa Barat melaksanakan otonomi daerah.

Pembangunan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang dialami oleh hampir setiap negara selalu disertai dengan perubahan struktur perekonomian, yaitu menurunnya pangsa sektor pertanian dan meningkatnya pangsa sektor nonpertanian, baik dalam hal sumbangan terhadap produk domestik bruto (PDB) maupun dalam penyerapan kesempatan kerja. Hal ini juga terjadi di Provinsi Jawa Barat.

Angkatan kerja merupakan salah satu faktor produksi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Jika angkatan kerja tidak dapat terserap seluruhnya di pasar kerja, akan terjadi pengangguran. Pada tahun 2007 sebanyak 24,38% tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat diserap di sektor pertanian. Jika tenaga kerja terlalu banyak di sektor pertanian, produktivitas tenaga kerja akan berkurang. Salah satu program kebijakan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat adalah kebijakan desentralisasi fiskal. Namun, apakah setelah pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal ini transformasi di bidang ekonomi sudah bisa diimbangi dengan transformasi di bidang ketenagakerjaan.

Berdasarkan uraian di atas, masalah pada penelitian ini adalah (1) Sejauh mana dan transformasi tenaga kerja sudah berjalan di Provinsi Jawa Barat, (2) Seberapa besar keterkaitan antar sektor pada saat berlangsungnya transformasi struktur tenaga kerja, terutama antara sektor pertanian, industri dan sektor lainnya, (3) Sejauh mana pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan transformasi tenaga kerja di sektor pertanian di Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang dipaparkan di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk (1) menganalisis transformasi struktur tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat, (2) menganalisis keterkaitan antar sektor pada saat berlangsungnya transformasi struktur tenaga kerja, terutama antara sektor pertanian, industri dan sektor lainnya, (3) menganalisis dampak desentralisasi fiskal terhadap transformasi struktur tenaga kerja, terutama pada sektor pertanian di Provinsi Jawa Barat.

## **METODE PENELITIAN**

### **Lokasi dan Waktu Penelitian**

Dalam penelitian ini lokasi yang akan dipilih adalah Provinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki potensi pertanian sekaligus daerah industri yang tumbuh pesat sehingga diharapkan memiliki data yang relatif lengkap untuk keperluan penelitian ini. Penelitian dilakukan pada tahun 2006 sampai 2008.

### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari beberapa instansi terkait, antara lain, Biro Pusat Statistik (BPS), Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans), dan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat. Data yang digunakan analisis perubahan struktur output dan tenaga kerja adalah data dari tahun 1975 sampai dengan tahun 2007. Karena

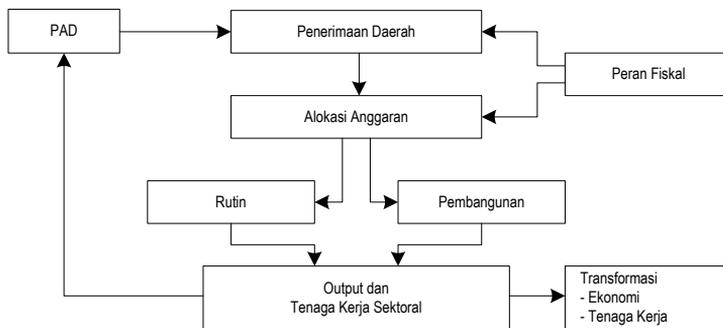
keterbatasan data pengeluaran pembangunan, data yang digunakan untuk analisis persamaan struktural dan simulasi kebijakan adalah data dari tahun 2000 sampai tahun 2003. Perubahan struktur pada model analisis diukur dari rasio ekonomi dan rasio tenaga kerja. Perubahan rasio ekonomi dan rasio tenaga kerja antara sektor pertanian dan nonpertanian merupakan pendekatan dari transformasi struktural.

### Spesifikasi Model

Model penelitian dibangun dengan 46 persamaan yang terdiri dari 32 persamaan struktural dan 14 persamaan identitas. Untuk keperluan simulasi kebijakan, model disusun dalam sistem persamaan simultan. Pada persamaan simultan disusun beberapa blok, yakni (a) blok fiskal, (b) blok produk domestik regional bruto, (c) blok penyerapan kerja, dan (d) blok rasio. Metode pendugaan pada penelitian ini adalah metode *two stage least square*. Prosedur SIMNLIN digunakan untuk peramalan simulasi kebijakan.

### Kerangka Pemikiran Konseptual

Pemerintah memiliki peran yang signifikan dalam menyusun anggaran untuk mendukung kinerja sektor riil baik melalui konsumsi dan investasi langsung maupun melalui efek multiplier dan stimulasi kepada pelaku ekonomi. Hasil dari alokasi anggaran adalah output yang diukur dari PDRB sektoral dan penyerapan tenaga kerja sektoral. Dari hasil output (PDRB) pemerintah daerah dapat menggali penerimaan daerah, selanjutnya menyusun lagi rencana pembangunan. Pelaksanaan pembangunan akan berdampak pada terjadinya transformasi ekonomi dan transformasi tenaga kerja.



Gambar 1. Kerangka pemikiran konseptual

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Transformasi Struktur Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Barat

Selama berlangsungnya proses pembangunan, Provinsi Jawa Barat mengalami transformasi struktur output dan tenaga kerja. Kontribusi tenaga kerja sektor pertanian turun dan kontribusi tenaga kerja sektor industri pengolahan dan sektor lain meningkat. Hal ini sejalan dengan pendapat Hayami dan Rulan (1971)

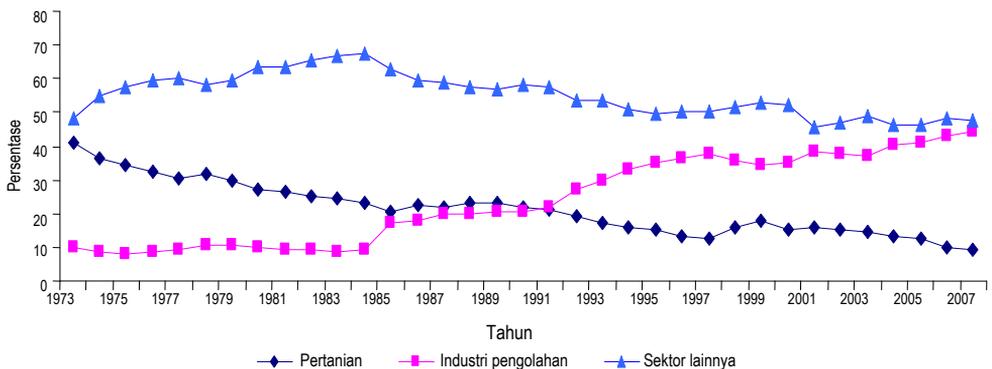
bahwa dalam proses pertumbuhan ekonomi pangsa sektor pertanian baik dalam PDB maupun dalam kesempatan kerja secara relatif menurun sejalan dengan peningkatan pendapatan perkapita. Terjadinya tranformasi tenaga kerja dari sektor pertanian ke nonpertanian menurut Rachmat (1992) sebagai akibat dari interaksi antara faktor pendorong dari dalam sektor pertanian dan faktor penarik dari luar sektor pertanian. Faktor penarik yang berasal dari sektor nonpertanian adalah (1) timbulnya kesempatan kerja di sektor nonpertanian, (2) kenyamanan bekerja di sektor nonpertanian relatif lebih baik, (3) upah lebih tinggi, (4) daya tarik kota/daerah industri, dan (5) asesibilitas dan komunikasi yang semakin baik. Transformasi tenaga kerja dapat juga terjadi sebagai dampak dari pengalihan industri dari negara maju ke negara berkembang (Simmons dan Kalantaridist, 1996).

Dilihat dari besarnya sumbangan masing-masing sektor terhadap total output Provinsi Jawa Barat, sumbangan sektor pertanian mengalami penurunan. Sektor pertanian mengalami penurunan dari 21,61% pada tahun 1987 menjadi 10,36% pada tahun 2007. Sementara, sektor lain juga mengalami penurunan yakni dari 58,85% pada tahun 1987 menjadi 47,69% pada tahun 2007. Di lain pihak, sektor industri pengolahan terus mengalami peningkatan dari 19,54% pada tahun 1987 menjadi 44,44% pada tahun 2007 (Tabel 1 dan Gambar 1). Hal ini sejalan dengan pendapat Clark (1940) dalam Dasril (1993) mengemukakan bahwa terdapat hubungan yang erat antara perubahan struktur produksi dan struktur kesempatan kerja, yang dicapai dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja di setiap sektor dan bergesernya tenaga kerja dari sektor dengan produktivitas lebih rendah ke sektor dengan produktivitas lebih tinggi.

Tabel 1. Sumbangan output dan tenaga kerja per sektor ekonomi di Jawa Barat periode 1977-2007

Tahun	Sektor pertanian (%)		Sektor industri pengolahan (%)		Sektor lainnya (%)	
	Output	TK	Output	TK	Output	TK
1977	30,70	60,18	9,14	9,03	60,16	30,80
1987	21,61	47,59	19,54	10,19	58,85	42,22
1997	12,63	32,86	37,86	16,95	50,49	50,19
2001	16,04	31,90	38,12	17,01	45,84	51,09
2007	10,36	24,38	44,44	19,53	47,69	56,35

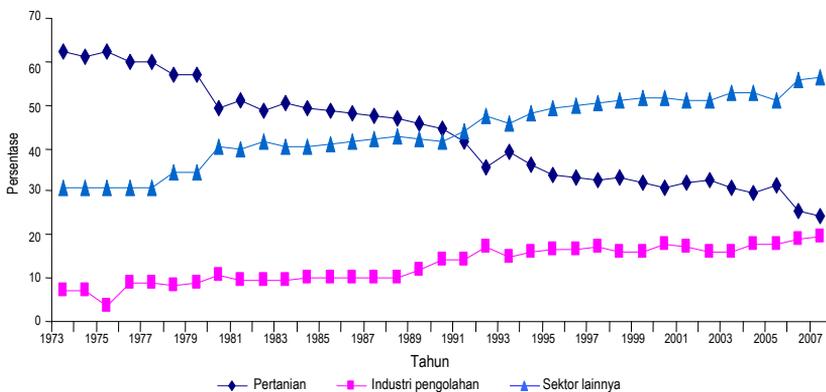
Sumber: BPS Jawa Barat berbagai tahun



Gambar 1. Perubahan kontribusi output pada perekonomian di Provinsi Jawa Barat tahun 1973-2007

### Keterkaitan Antarsektor pada Saat Berlangsungnya Transformasi Struktur Tenaga Kerja, Terutama antara Sektor Pertanian, Industri dan Sektor Lainnya

Perubahan kontribusi tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada Tabel 1 dan Gambar 3. Jika dilihat dari besarnya sumbangan masing-masing sektor terhadap total tenaga kerja Provinsi Jawa Barat, sumbangan sektor pertanian yang terdiri dari sektor tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan mengalami penurunan. Sektor pertanian mengalami penurunan dari 47,59% pada tahun 1987 menjadi 24,38% pada tahun 2007. Namun, sektor lain mengalami peningkatan, yakni dari 42,22% pada tahun 1987 menjadi 56,35% pada tahun 2007. Di lain pihak, sektor industri pengolahan terus mengalami peningkatan dari 10,19% pada tahun 1987 menjadi 19,53% pada tahun 2007. Penurunan kontribusi pada sektor pertanian tidak diikuti oleh peningkatan kontribusi tenaga kerja sektor industri dalam jumlah yang seimbang. Tenaga kerja dari sektor pertanian tidak mudah masuk ke sektor industri, karena sikap mental tenaga kerja petani yang tidak siap untuk bekerja di sektor industri dan tenaga kerja dari sektor pertanian kurang memiliki keahlian dan keterampilan khusus seperti yang dibutuhkan di sektor industri.



Gambar 3. Perubahan kontribusi tenaga kerja di Jawa Barat tahun 1973-2007

Pertumbuhan output sektor pertanian lebih kecil jika dibandingkan dengan sektor nonpertanian. Pada tahun 2007, pertumbuhan output sektor pertanian sebesar 5,13% sedangkan pertumbuhan output sektor nonpertanian sebesar 13,84%. Di lain pihak, pertumbuhan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian cenderung menurun, sedangkan di sektor nonpertanian cenderung meningkat. Pertumbuhan tenaga kerja sektor pertanian sebesar -2,95%, sementara pertumbuhan tenaga kerja sektor nonpertanian sebesar 3,80%. Hal ini sejalan dengan hasil penulisan Chenery dan Syrquin (1975) yang menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan yang ditandai dengan peningkatan GNP per kapita diikuti dengan penurunan pangsa sektor pertanian dan peningkatan pangsa sektor manufaktur dan jasa.

Dari model penelitian diperoleh bahwa produk domestik regional bruto (PDRB) untuk sektor tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan dipengaruhi oleh pengeluaran pembangunan untuk pertanian dan irigasi, sedangkan untuk sektor perikanan dan kehutanan dipengaruhi oleh tenaga kerja.

PDRB sektor industri dan jasa dipengaruhi oleh tenaga kerja dan pengeluaran pembangunan untuk sektor infrastruktur. PDRB sektor industri dipengaruhi juga oleh kondisi perekonomian daerah tersebut yang dapat dilihat dari rasio tenaga kerja antara sektor pertanian dan nonpertanian.

Penggunaan tenaga kerja sektor pertanian dipengaruhi oleh pengeluaran pembangunan dan kondisi perekonomian yang dilihat dari rasio ekonomi antara PDRB pertanian dan nonpertanian. Sementara penyerapan tenaga kerja di sektor industri, sektor jasa, sektor pertambangan, sektor listrik gas dan air bersih, sektor bangunan, dan sektor perdagangan dipengaruhi oleh PDRB masing-masing sektor. Hal ini sejalan dengan penggunaan tenaga kerja di sektor keuangan hasil penelitian Mangkuprawira (2000) yang menyatakan bahwa pendapatan regional sektor sektoral berpengaruh terhadap kesempatan kerja sektor sektoral. Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian Haryono (2008) yang mengungkapkan bahwa peningkatan penyerapan tenaga kerja disebabkan oleh adanya peningkatan jumlah output yang dihasilkan sehingga perusahaan merespons dengan meningkatkan jumlah tenaga kerjanya.

### Simulasi Kebijakan

Simulasi dilakukan untuk melihat perubahan struktur tenaga kerja sebagai dampak dari kebijakan fiskal oleh pemerintah daerah. Peningkatan yang digunakan pada penelitian ini adalah 20% dengan pertimbangan (1) mengantisipasi pertumbuhan penduduk dan (2) mengimbangi tingkat inflasi. Hasil simulasi ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil simulasi kebijakan fiskal daerah

Variabel	SIM 1	SIM 2	SIM 3	SIM 4	SIM 5
	%				
Pajak Daerah	20,00	2,70	-0,78	-4,48	5,85
Dana Alokasi Umum	0,42	12,73	0,56	-0,75	20,00
Pengeluaran infrastruktur	-0,10	8,10	0,21	20,00	11,62
Pengeluaran sektor pertanian	-0,05	3,87	20,00	-0,26	5,55
PDRB	0,03	4,22	-0,50	0,87	4,31
PDRB pertanian	-0,26	11,14	5,72	-9,55	8,67
PDRB nonpertanian	0,09	2,76	-1,81	3,06	3,40
Rasio ekonomi	-0,32	10,46	3,86	-12,81	10,04
Total penyerapan tenaga kerja	-0,04	4,90	-0,04	-1,96	6,50
Tenaga kerja pertanian	-0,30	10,58	3,62	-11,60	11,04
Tenaga kerja nonpertanian	0,06	2,65	-1,48	1,85	4,71
Rasio tenaga kerja	-0,27	9,60	3,39	-10,16	7,58

Keterangan:

Simulasi 1 : Peningkatan pajak daerah sebesar 20%

Simulasi 2 : Peningkatan belanja pegawai sebesar 20%

Simulasi 3 : Peningkatan pengeluaran sektor irigasi dan pertanian sebesar 20%

Simulasi 4 : Peningkatan pengeluaran pembangunan sektor infrastruktur sebesar 20%

Simulasi 5 : Peningkatan dau sebesar 20%

### Peningkatan Pajak Daerah Sebesar 20%

Peningkatan pajak daerah sebesar 20% berdampak PDRB sektor pertanian sehingga berdampak pada penurunan penyerapan tenaga kerja sektor pertanian. Hal ini sejalan dengan pendapat Kniesner and Ziliak (2002) yang menyatakan bahwa pada umumnya pajak akan menurunkan pendapatan masyarakat. Di lain pihak, peningkatan PDRB sektor nonpertanian berdampak pada peningkatan

penyerapan tenaga kerja di sektor nonpertanian. Meskipun demikian, total penyerapan tenaga kerja berkurang. Penurunan penyerapan tenaga kerja sektor pertanian dan peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor nonpertanian berdampak pada penurunan rasio tenaga kerja sebesar 0,27%, yang berarti bahwa kontribusi sektor pertanian menjadi berkurang. Hal ini menunjukkan terjadinya transformasi tenaga kerja (Tabel 2).

#### **Peningkatan belanja pegawai 20%**

Peningkatan belanja rutin sebesar 20% berdampak pada peningkatan PDRB sektor pertanian dan PDRB sektor nonpertanian. Peningkatan PDRB sektor pertanian dan PDRB sektor nonpertanian berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja baik di sektor pertanian maupun di sektor nonpertanian sehingga total penyerapan tenaga kerja meningkat. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Chambers dan Quiggin (2005) tentang dampak subsidi harga yang menyimpulkan bahwa dengan adanya subsidi harga output, penawaran akan meningkat. Penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian meningkat lebih besar daripada sektor nonpertanian sehingga berdampak pada peningkatan rasio tenaga kerja sebesar 9,60%, yang berarti kontribusi sektor pertanian menjadi meningkat.

#### **Peningkatan pengeluaran sektor irigasi dan pertanian sebesar 20%**

Peningkatan pengeluaran sektor irigasi dan pertanian sebesar 20% berdampak pada peningkatan PDRB sektor pertanian dan terjadi penurunan terhadap PDRB sektor nonpertanian. Hal ini berdampak pada penurunan total PDRB. Peningkatan PDRB sektor pertanian meningkatkan penyerapan tenaga kerja sektor pertanian. Penurunan PDRB sektor nonpertanian menurunkan penyerapan tenaga kerja sektor nonpertanian, sehingga rasio tenaga kerja meningkat sebesar 3,39%, yang berarti kontribusi sektor pertanian menjadi meningkat.

#### **Peningkatan anggaran pembangunan sektor infrastruktur sebesar 20%**

Peningkatan anggaran pembangunan sektor infrastruktur sebesar 20% berdampak pada peningkatan PDRB dan PDRB sektor nonpertanian, tetapi berdampak pada penurunan PDRB sektor pertanian. Penurunan PDRB sektor pertanian berdampak pada penurunan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian dan berdampak negatif terhadap rasio tenaga kerja. Rasio tenaga kerja berkurang sebesar 10,16%, yang berarti kontribusi tenaga kerja di sektor pertanian menjadi berkurang dan hal ini menunjukkan terjadinya transformasi tenaga kerja. Hal ini sejalan dengan pendapat Fisher (1935) dalam Hagen (1975) yang mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi disertai dengan pergeseran permintaan dari sektor primer (pertanian) ke sektor sekunder dan akhirnya ke sektor tersier.

#### **Peningkatan DAU sebesar 20%**

Peningkatan DAU sebesar 20% berdampak pada peningkatan PDRB. Peningkatan PDRB sektor pertanian dan PDRB sektor nonpertanian berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja baik di sektor pertanian maupun di sektor nonpertanian, sehingga total penyerapan tenaga kerja meningkat. Peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian lebih besar dari sektor nonpertanian sehingga berdampak pada peningkatan rasio tenaga kerja sebesar 7,56%, yang berarti kontribusi tenaga kerja sektor pertanian meningkat.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah, dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

- (1) Provinsi Jawa Barat mengalami transformasi struktur tenaga kerja selama berlangsungnya proses pembangunan. Kontribusi tenaga kerja di sektor pertanian menurun, kontribusi tenaga kerja sektor industri meningkat, dan kontribusi sektor lainnya meningkat.
- (2) Selama berlangsungnya transformasi struktur tenaga kerja, sektor pertanian tidak berkaitan erat dengan sektor industri, tetapi berkaitan erat sektor lainnya. Penurunan kontribusi tenaga kerja di sektor pertanian tidak secara otomatis diikuti oleh peningkatan kontribusi tenaga kerja di sektor industri, tetapi diserap di sektor lainnya, seperti sektor informal.
- (3) Peningkatan pengeluaran untuk belanja pegawai dan penerimaan daerah dari DAU berdampak positif baik terhadap tenaga kerja sektor pertanian, total tenaga kerja, dan kontribusi tenaga kerja sektor setor pertanian meningkat.
- (4) Peningkatan pengeluaran untuk sektor pertanian berdampak positif terhadap tenaga kerja pertanian dan terjadi peningkatan kontribusi tenaga kerja sektor pertanian, tetapi berdampak negatif terhadap total tenaga kerja.
- (5) Peningkatan pengeluaran untuk infrastruktur berdampak positif terhadap tenaga kerja total, tetapi berdampak negatif pada tenaga kerja sektor pertanian dan kontribusi tenaga kerja sektor pertanian menjadi menurun, yang berarti terjadi transformasi di sektor pertanian.

### **Saran**

Berdasarkan dari hasil pembahasan, dapat diajukan implikasi kebijakan sebagai berikut:

- (1) Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah melakukan kebijakan fiskal, misalnya melalui pengeluaran belanja pegawai dan DAU. Kebijakan ini dapat meningkatkan baik PDRB maupun penyerapan tenaga kerja sektor pertanian dan nonpertanian.
- (2) Guna meningkatkan output di sektor pertanian pemerintah perlu meningkatkan pengeluaran pembangunan di sektor pertanian dan irigasi. Kebijakan ini dapat meningkatkan baik PDRB maupun penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian.
- (3) Upaya untuk meningkatkan output dan penyerapan tenaga kerja di sektor nonpertanian, pemerintah perlu menjalankan kebijakan peningkatan pengeluaran pembangunan di sektor infrastruktur. Kebijakan ini dapat menarik investasi di sektor industri dan sektor lainnya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Chambers RG, Quiggin J. 2005. Output Price Subsidie in a Stochastic World. *American Journal of Agricultural Economics*.87 (7): 501-508.
- Chenery, Syrquin. 1975. *Pattern of Development 1950-1970*. London: Oxford University Press.

- Dasril ASN. 1993. *Pertumbuhan dan Perubahan Struktur Produksi Sektor Pertanian dalam Industrialisasi di Indonesia [disertasi]*. Bogor: Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
- Hagen EE. 1975. *The Economics of Development*. Illinois: Richard D. Irwin, Inc.
- Haryono D. 2008. *Dampak Industrialisasi pertanian terhadap kinerja sektor pertanian dan kemiskinan pedesaan: Model CGE Recursive Dynamic [disertasi]*. Bogor: Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
- Hayami Y, Rulan VW. 1971. *Agricultural Development: An International Perspective*. Maryland: The John Hopkins University Press.
- Kniesner TJ, Ziliak JP. 2002. Tax reform and automatic stabilization. *The American Economic Review*. 92(3):590-612.
- Mangkuprawira S. 2000. Analisis perilaku pasar kerja di wilayah Jawa dan Bali. *Mimbar Sosek*. 23(1): 60-78.
- Rachmat M. 1992. Kesempatan kerja dan prospek ketenagakerjaan dalam pengembangan tebu di Jawa. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. 9(2) dan 10(1):30-39.
- Simmons C, Kalantaridist C. 1996. Making Garments in Southern Europe: Entrepreneurship and Laabor in Rural Greece. *Journal of Rural Studies*. 12(2): 169-185.